

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep Multikulturalisme

Secara etimologi, multikulturalisme berasal dari bahasa Inggris *multi* (banyak) dan *cultural* (Budaya). Dengan demikian, multikulturalisme dapat dimaknai sebagai paham yang menghormati banyak kebudayaan dalam sebuah masyarakat. Multikulturalisme dapat pula diterjemahkan sebagai sebuah filosofi, program, atau kebijakan yang mengakui adanya perbedaan budaya. Dalam konteks ini, multikulturalisme sangat terkait dengan istilah-istilah lain seperti multibahasa, multiras, multietnis, multiidentitas, dan lain sebagainya (Bakry, 2021:4).

Multikulturalisme adalah gagasan atau cara pandang terhadap dunia yang mengungkapkan adanya *cultural diversity* (keberagaman budaya) yang suatu bangsa miliki, multikulturalisme adalah sebuah ide yang mengakui serta mengagungkan manusia secara universal, dan juga adanya hak akan perbedaan namun sederajat. Yang dimaksud dari perbedaan tersebut ialah perbedaan secara individual atau orang per orang serta perbedaan budaya. Adanya perbedaan budaya ini mendorong upaya terwujudnya keanekaragaman budaya sebagai suatu corak kehidupan masyarakat yang memiliki keanekaragaman kultur, yaitu saling menghormati serta memahami kebudayaan mereka yang unik diantara satu sama lain termasuk minoritas (Suparlan, 2002:10).

Senada dengan Suparlan, menurut Rustam (2013:133), akar kata dari multikulturalisme ialah kebudayaan, pengertian tentang kebudayaan itu sendiri beragam menurut para ahli, namun dalam konteks ini kebudayaan diartikan sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Maka dalam konteks itu, multikulturalisme merupakan sebuah ideologi yang dapat menjadi alat untuk meningkatkan derajat kehidupan manusia serta kemanusiaannya. Multikulturalisme mengakui dan juga mengagungkan adanya perbedaan dalam kesederajatan baik itu dalam ruang lingkup individu maupun kebudayaan.

Multikulturalisme mengisyaratkan tentang pengakuan terhadap keragaman kebudayaan yang nyata, dimana hal ini mencakup baik itu keberagaman tradisional (keberagaman suku, ras, dan agama) maupun keberagaman bentuk-bentuk kehidupan yang eksis di setiap sejarah perjalanan kehidupan manusia (Irhandayaningsih, 2012:2).

Pacheco dan Carla Fernandez Duran dalam Bakry (2021:5) mengatakan bahwa multikulturalisme dimulai dengan pengakuan hak untuk berbeda dan dari penghormatan terhadap keberagaman budaya, Multikulturalisme juga merupakan situasi dimana semua kelompok budaya atau ras yang berbeda dalam suatu masyarakat memiliki hak dan peluang yang sama, dan tidak ada yang diabaikan atau dianggap sebagai tidak penting.

Multikulturalisme bisa dikatakan sebagai suatu sistem keyakinan dan perilaku yang mengakui dan menghormati kehadiran semua kelompok yang berbeda dalam suatu organisasi atau masyarakat, mengakui dan menghargai

perbedaan sosio-kultural mereka. Multikulturalisme merupakan soal penghargaan terhadap keanekaragaman budaya (*cultural diversity*). Dengan kata lain, pengakuan juga harus datang rasa hormat (*respect*). Penghormatan adalah proses dimana orang atau kelompok lain diperlakukan dengan hormat, sopan santun, dan belas kasihan dalam upaya untuk melindungi integritas, martabat, nilai, dan nilai sosial individu atau kelompok (Bakry, 2021:6).

Di dalam suatu pergaulan komunitas, budaya dianggap penting karena budaya dapat menjadi alat perekat diantara komunitas-komunitas tersebut (*culture matters*) sejalan dengan perkataan yang diucapkan oleh Mohandas Karamchad Gandhi yang mengungkapkan betapa pentingnya budaya sebagai alat untuk mempersatukan suatu bangsa (Tilaar, 2004:82)

Menurut Tilaar (2004:92), Kondisi komunitas yang Multikultur itu sendiri memiliki dua sisi yang saling berbanding terbalik yaitu sisi positif dan sisi negatif yang lahir dari keadaan keragaman budaya tersebut apabila keadaan multikultur tersebut tidak dipahami secara baik. Multikulturalisme bukannya tidak mungkin dapat menyimpan suatu bahaya yaitu berpotensi untuk menumbuhkan sikap fanatik akan satu budaya tertentu di dalam masyarakat. Apabila sikap fanatisme tersebut tumbuh berkembang, maka yang akan terjadi adalah adanya konflik dengan kebudayaan yang lain sehingga berakibat pada robohnya struktur dari suatu komunitas. Namun, apabila kondisi multikulturalisme dipahami dengan baik, maka yang akan terjadi adalah kebalikannya yaitu lahirnya sikap toleransi dan rasa penghargaan terhadap setiap kebudayaan yang beragam yang berujung pada

semakin kuatnya integritas kesatuan bangsa yang menjadi pengikat negara Indonesia. Multikulturalisme hendaknya menjadi idea untuk untuk memberikan rasa cinta terhadap sesama, meningkatkan derajat, serta saling membantu terhadap sesama. Oleh karena itu, multikulturalisme adalah sebuah alat guna membina pergaulan dunia yang aman dan sejahtera, dimana tiap-tiap manusia mampu untuk saling membantu dan saling menghargai satu sama lain (Tilaar, 2004:94).

Menurut Prayitno (2004:52), Multikulturalisme merupakan sebuah konsep penerimaan serta legitimasi terhadap citra orang lain yang muncul melalui perbedaan pengalaman dan perbedaan konteks. Multikulturalisme memiliki arti acceptance (penerimaan) yang ramah pada realitas sosial dan budaya yang beragam. Makna multikulturalisme kian berkembang dimana multikulturalisme tidak hanya semata-mata membahas mengenai budaya saja, namun terlibat juga didalamnya yaitu perbedaan yang bersifat politik, sosial, maupun budaya. Dalam setiap perbedaan tersebut dapat diartikulasikan sebagai sebuah aksi politik. Multikulturalisme adalah klaim pengakuan untuk menerima perbedaan yang eksis di tengah-tengah pergaulan masyarakat. Pengakuan tersebut adalah sebagai sebuah bentuk pendefinisian diri atas identitas orang lain.

Prayitno (2004:53) menambahkan, Di dalam kehidupan masyarakat, pasti ada individu maupun kelompok yang memiliki gaya hidup yang berbeda dan memiliki konsep yang berbeda mengenai kehidupan. Mereka mampu hidup bersama secara tentram dan damai sekaligus terjadi pula interaksi yang "adil" diantara mereka. Meskipun begitu, ada realita dimana

mereka yang memiliki hidup yang damai ada berada di posisi kaum mayoritas sementara itu kaum minoritas merasa ditekan contoh halnya seperti mereka tidak mampu bertindak dan berekspresi sebebais mungkin yang disebabkan oleh eksistensi kaum mayoritas. Dalam kehidupan masyarakat modern, masyarakat tidak jarang dihadapkan dengan tuntutan dari kelompok minoritas yang ingin identitas mereka diakui sekaligus menerima kebudayaan mereka, hal ini seringkali disebut sebagai tantangan dari multikulturalisme itu sendiri (Kymlicka, 2015:13).

Menurut Parekh (1997, 183-185), multikulturalisme dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu :

- Multikulturalisme Isolasionis : mengacu kepada jenis masyarakat multikultur yang menjalankan hidup secara bebas dan mandiri serta keterlibatan interaksi yang minim terhadap masyarakat lain dan hanya terlibat dengan satu sama lain. Masyarakat tipe ini tetap menerima keberagaman, namun pada saat yang sama mereka berusaha untuk mempertahankan kebudayaan mereka sendiri.
- Multikulturalisme Akomodatif : mengacu kepada jenis masyarakat multikultur dimana masyarakat dengan kultur yang mayoritas membuat suatu akomodasi penyesuaian tertentu terhadap masyarakat dengan kultur yang minoritas. Masyarakat mayoritas membuat serta merumuskan sebuah peraturan namun mereka memberikan hak kepada masyarakat minoritas untuk mempertahankan serta mengembangkan kebudayaan mereka sendiri masyarakat minoritas pun tidak melakukan perlawanan terhadap masyarakat mayoritas

- Multikulturalisme Otonomis : mengacu kepada jenis masyarakat multikultur dimana masyarakat yang mempunyai keberagaman dalam kebudayaan berusaha untuk mencapai kesetaraan dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan yang otonom dalam kerangka politik yang diterima secara kolektif. Fokus dari jenis ini adalah untuk mempertahankan cara hidup mereka dan menciptakan suatu tatanan masyarakat dimana tiap-tiap kelompok kebudayaan dapat eksis dalam derajat yang setara.
- Multikulturalisme Interaktif/Kritikal : mengacu kepada jenis masyarakat multikultur yang tidak memfokuskan dirinya pada kehidupan yang otonom, tetapi memfokuskan dirinya untuk membangun penciptaan kolektif yang merefleksikan dan mempertegas perspektif-perspektif distingtif diantara mereka. Dalam multikulturalisme jenis ini, akan ada upaya penolakan dari masyarakat dengan kultur mayoritas dan bahkan secara berusaha secara represif untuk menerapkan kebudayaan mereka dengan mengabaikan budaya-budaya yang minoritas. Oleh karena itu, cenderung akan ada perlawanan dari masyarakat kultur minoritas terhadap masyarakat kultur mayoritas.
- Multikulturalisme Kosmopolitan : mengacu kepada jenis masyarakat multikultur yang berusaha untuk menghapus garis-garis perbedaan kebudayaan dan membangun sebuah tatanan masyarakat yang tidak lagi terikat kepada kebudayaan mereka masing-masing sekaligus

terlibat secara bebas dalam eksperimen-eksperimen interkultural untuk mengembangkan kehidupan.

2. Konsep Politik Identitas

Dalam rangka membahas politik identitas secara khusus, peneliti mencoba menjelaskan secara terpisah terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kata 'politik' dan 'identitas' dalam konteks pembahasan politik identitas karena kedua kata tersebut memiliki maknanya masing-masing. Saat ini, sudah banyak sarjana politik yang membuat definisi tentang apa itu politik. Budiardjo (2015:15), pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha untuk menggapai *the good life* ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu. Masyarakat mengambil keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu. Politik merupakan kegiatan suatu bangsa yang mempunyai tujuan untuk membuat, mempertahankan, serta mengamandemen peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan masyarakatnya, yang tidak dapat terlepas dari konflik dan kerjasama (Heywood dalam Budiardjo, 2015:16). Dengan melihat definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam proses pembuatan keputusan yang menyangkut publik, maka tidak akan lepas dari yang namanya konflik.

Lalu, apa yang dimaksud dengan identitas? Menurut Bakry (2020:155) identitas dapat dipahami sebagai ciri-ciri fisik atau kualitas yang membuat seseorang atau sekelompok orang yang membuat mereka berbeda atau unik dari yang lain. Identitas adalah kondisi atau fakta yang menjadikan sekelompok orang sama atau memiliki kesamaan. Misalnya, orang-orang negro memiliki kulit gelap dan rambut keriting. Di sini identitas fisik (ciri-ciri atau karakteristik fisik) mereka sama. Contoh lain, orang Dayak dan orang Papua berbeda secara fisik, tetapi memiliki kesamaan sebagai orang Indonesia. Di sini Indonesia adalah identitas bersama orang Dayak dan orang Papua. Buchari (2014:18) mendefinisikan identitas sebagai perasaan diri individu atau kelompok, produk kesadaran diri atau kualitas berbeda yang dimiliki orang untuk membedakan diri dari orang lain. Identitas merupakan faktor penting dalam membentuk sikap dan perilaku manusia maupun perilaku kelompok. Identitas yang berbeda cenderung membedakan sikapnya terhadap sesuatu dan perilakunya sehari-hari. Menurut Setyaningrum dalam Bakry (2005:19) didalam sudut pandang sosiologi dan politik, identitas biasanya dibagi menjadi dua kategori yaitu identitas sosial (gender, jenis kelamin, kelas, ras, etnis) serta identitas politik (kewarganegaraan dan kebangsaan).

Sedangkan, politik identitas menurut Heyes sebagaimana dikutip oleh Lestari (2018:21) mendefinisikan politik identitas sebagai suatu penandaan kegiatan politik dalam pengertian yang lebih luas dan teorisasi terhadap ditemukannya pengalaman ketidakadilan yang dialami oleh anggota-anggota dari kelompok-kelompok sosial tertentu. Politik identitas hadir sebagai

tindakan politis yang mengedepankan kepentingan kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan etnis, gender, keagamaan dan sejenisnya (Sjaf, 2014:40).

Politik identitas dapat dikatakan sebagai alat perjuangan bagi suatu etnis dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan yang mereka ingin raih, dimana munculnya perjuangan ini cenderung diakibatkan karena adanya faktor-faktor tertentu yang menurut pandangan etnis tersebut dirasa sebagai suatu tekanan yaitu berbentuk ketidakadilan yang dapat dirasakan oleh etnis tersebut. Karena adanya perasaan senasib itu, maka mereka menunjukkan identitas atau jati diri keetnisannya dalam bentuk perjuangan politik (Buchari, 2014:20)

Menurut Ford dalam Bakry (2020:158), masalah politik identitas sebenarnya bukan hal yang baru sebab semua politik melibatkan unsur identitas dan semua identitas bersifat politik. Akan tetapi, ketika kita menggunakan frasa "politik identitas" tentu mengacu pada sesuatu yang lebih spesifik atau bermakna khusus. Politik identitas menunjukkan orientasi politik yang dibangun di sekitar identitas sosial (yang sudah ada sebelumnya). Dengan kata lain, identitas sudah ada pada diri seseorang sebelum masuk ke arena, proses, atau aktivitas politik. Secara sederhana, politik identitas dapat dipahami sebagai aktivitas politik yang berbasis identitas, atau menggunakan identitas dalam keterlibatan politik, atau sebaliknya memperjuangkan kepentingan dan kebaikan identitas melalui sarana politik. Dilihat dari substansinya, politik identitas acapkali dihubungkan dengan kepentingan yang dimiliki oleh anggota-anggota

kelompok masyarakat yang dimana mereka merasa terdiskriminasi oleh dominasi yang besar di dalam ruang lingkup bangsa atau negara (Sukatno, 2018:4).

Bakry (2020:158) mengatakan istilah politik identitas dalam penggunaan secara umum mengacu pada kecenderungan orang berbagi identitas ras, agama, etnis, sosial, atau budaya tertentu untuk membentuk aliansi politik yang eksklusif, daripada terlibat dalam politik partai tradisional yang berbasis luas, atau mempromosikan kepentingan kelompok tertentu tanpa memperhatikan kepentingan kelompok politik yang lebih besar. Hal ini senada dengan yang dikemukakan Klein dalam Bakry (2020:158) mengatakan bahwa politik identitas adalah kecenderungan orang-orang dari ras, agama, jenis kelamin, atau etnis tertentu untuk mengatur secara politis seputar kepentingan khusus mereka dengan tujuan semata-mata untuk memajukan kepentingan ras, agama, jenis kelamin, atau etnis tersebut tanpa kepedulian atau perhatian pada atau kelompok kolektif yang lebih besar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa politik identitas selalu terkait dengan kepentingan kelompok tertentu. Kelompok itu berbasis ras, etnis, agama, budaya, sosial, ekonomi, gender, daerah, dan jenis pengelompokan apa pun. Mereka merupakan suatu kelompok yang merasa termarginalkan dalam sistem yang merasakan adanya ketidakadilan, penindasan, dominasi, atau hegemoni dari kelompok yang lebih besar atau dominan. Sementara itu, kepentingan dari kelompok tersebut dalam menggunakan atau menonjolkan identitas dalam aktivitas politiknya adalah untuk mempromosikan gagasan

dan pandangan dunianya yang berbeda, serta menentang karakterisasi yang dipaksakan oleh kelompok dominan (Bakry, 2020:159).

Menurut Vasikili Neofotistos dalam Bakry (2020:160), politik identitas, juga biasa disebut sebagai politik berbasis identitas (*identity-based politics*), merupakan frasa yang banyak digunakan dalam ilmu sosial dan humaniora. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan penyebaran kategori identitas sebagai alat untuk membingkai klaim-klaim politik, mempromosikan ideologi-ideologi politik, atau merangsang dan mengorientasikan tindakan sosial dan politik. Semua ini dilakukan biasanya dalam konteks ketidaksetaraan (*inequality*) atau ketidakadilan (*injustice*) yang lebih besar dan dengan tujuan untuk menegaskan kekhasan dan kepemilikan kelompok serta mendapatkan kekuatan dan pengakuan dari kelompok lain (yang lebih mapan).

Pandangan Vasikili Neofotistos tersebut didukung pendapat Clarissa Rile Hayward dan Ron Watson dalam Bakry (2021:161) yang menegaskan bahwa politik identitas adalah politik di mana ketika orang-orang terlibat, bergerak, men definisikan pengalaman mereka, masalah politik mereka, dan tujuan mereka, berdasarkan kebaikan kelompok identitas. Secara historis, politik identitas tumbuh dari pengalaman penindasan berbasis identitas, pengalaman ketidaksetaraan dalam sumber daya dan peluang yang dihadapi orang-orang sebagai anggota kelompok identitas tertentu. Ungkapan politik identitas telah menandakan berbagai kegiatan politik yang ditemukan dalam pengalaman bersama tentang ketidakadilan dari kelompok sosial tertentu. Kelompok tertentu yang telah merasakan pengalaman ketidakadilan

bersama dalam hal ini berjuang baik sekedar untuk menegaskan eksistensinya, mempromosikan pandangan-pandangannya yang berbeda, maupun menentang dominasi dari kelompok yang lebih besar. Oleh sebab itu, politik identitas sering mengacu pada ketegangan dan pergulatan tentang hak untuk memetakan dan mendefinisikan kontur, serta memperbaiki esensi dari kelompok tertentu. Perjuangan dan pergulatan mereka itu acapkali juga bertujuan untuk mendapatkan kembali penentuan nasib sendiri (*self-determination*), atau sekurang kurangnya kebebasan politik yang lebih besar (Bakry, 2020:162).

Harold D. Laswell dalam Rozi (2019:1) berpendapat bahwa Politik identitas bisa dimaknai sebagai strategi dan kontestasi ikatan simbol kultural primordial (agama, kesukuan, ras, kelompok) dalam memperjuangkan siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Agnes Heller dalam Hanifiya (2018:37) mengatakan bahwa politik identitas secara sederhana dapat dimaknai sebagai strategi politik yang memfokuskan pada perbedaan dan pemanfaatan ikatan primordial sebagai kategori utamanya. Politik identitas dapat memunculkan toleransi dan kebebasan, namun di lain pihak, politik identitas juga akan memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan verbal fisik, dan juga pertentangan etnis dalam kehidupan.

Thomas Meyer (2013:15) mengatakan bahwa di penghujung abad 20, konsepsi politik identitas gencar disuarakan mengenai isu politik perbedaan dan rasisme budaya, pada titik tertentu politik identitas mengarah pada diskriminasi, eksploitasi, dominasi, penaklukan atau konflik sosial yang berdasarkan atas adanya benturan identitas kultural. Politik identitas lahir

sebagai konsep dan gerakan yang fokus perhatiannya adalah perbedaan sebagai kategori politik yang utama (Abdillah, 2019:16).

Menurut Haboddin (2012:120) pemahaman terhadap politik identitas ini memiliki implikasi pada kecenderungan untuk: 1.) agar mendapatkan adanya pengakuan serta perlakuan yang sama rata, 2.) untuk menjaga serta melestarikan nilai-nilai budaya yang merupakan ciri khas dari kelompok tersebut. 3.) sebagai bentuk kesetiaan yang kuat pada keetnisan yang dimiliki oleh kelompok tersebut.

3. Konsep Elit

Menurut Lipset dan Solari dalam Haryanto (2017:4), Elit adalah seseorang atau kelompok yang mempunyai keunggulan dan menduduki puncak dalam struktur-struktur sosial masyarakat, contohnya seperti posisi-posisi tertinggi di bidang politik, pemerintahan ekonomi, agama, pengajaran, dan pekerjaan-pekerjaan bebas. Sejalan dengan apa yang dikatakan Lipset dan Solari, Sumardjan dalam Haryanto (2017:6) mengatakan bahwa elit adalah seseorang atau kelompok yang memiliki keunggulan-keunggulan yang memiliki fungsi untuk menjalankan suatu peran yang dominan dalam struktur kehidupan tertentu, contohnya seperti bidang politik dan ekonomi.

Pareto dan Mosca dalam Haryanto (2017:7) berpendapat bahwa dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat baik masyarakat modern maupun tradisional, akan ada segelintir orang atau kelompok yang mempunyai *power* untuk memerintah anggota masyarakat yang lain. Segelintir orang atau kelompok tersebut terbagi menjadi dua yaitu elit yang sedang memerintah

(*governing elite*) yang merupakan sekelompok orang yang sedang menduduki jabatan-jabatan politik dan elit yang tidak sedang memerintah (*non-governing elite*) yang merupakan sekelompok orang yang tidak menduduki jabatan-jabatan politik tetapi memiliki kekuatan untuk mempengaruhi proses dalam pembuatan suatu kebijakan. Pareto dan Mosca menambahkan bahwa masyarakat terbagi menjadi dua lapis, yaitu anggota masyarakat yang teridentifikasi ke dalam kelompok elit yang kuantitasnya lebih sedikit apabila dikomparasikan dengan anggota masyarakat yang tidak termasuk ke dalam kelompok elit (*non-elite*).

Dorso dalam Haryanto (2017:8) memiliki pendapat yang senada dengan Pareto dan Mosca dimana dia mengatakan bahwa di dalam kehidupan masyarakat, dapat ditemui suatu dikotomi yang membagi masyarakat menjadi dua yaitu sekelompok anggota masyarakat yang memiliki peran sebagai kelas yang memerintah karena memiliki kekuasaan dan berjumlah sedikit (*Ruling Class*) dan sekelompok anggota masyarakat yang memiliki peran sebagai kelas yang diperintah dan berjumlah banyak (*Ruled Class*). *Ruling Class* itu sendiri terbagi kembali menjadi *The Political Class* yang sebagai instrumen teknis dari kelas yang sedang memerintah yang didalamnya terdapat 2 subkelas yaitu *The Government Political Class/The Ins* dan *The Opposition Political Class/The Outs*. Dari penjelasan Pareto dan Mosca serta Dorso, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa di dalam suatu masyarakat, akan ditemukan dua kelompok masyarakat yang terkategori yaitu kelompok masyarakat yang memiliki keunggulan dan kelompok masyarakat yang tidak memiliki keunggulan. Kelompok masyarakat yang memiliki keunggulan

memiliki kemampuan untuk menggenggam kekuasaan yang berguna untuk mempengaruhi suatu kebijakan dan mengontrol mereka yang tidak memiliki keunggulan. Kelompok masyarakat yang memiliki keunggulan cenderung lebih sedikit kuantitasnya dibandingkan kelompok masyarakat yang tidak memiliki keunggulan. Kelompok masyarakat yang memiliki keunggulan dapat kita sebut sebagai Elit dan kelompok masyarakat yang tidak memiliki keunggulan dapat kita sebut sebagai non-Elit.

Menurut Laswell dalam Haryanto (2017:88), elit adalah suatu kelas yang terdiri dari individu-individu yang berhasil menduduki kedudukan dominasi dalam stratifikasi masyarakat, dalam artian bahwa nilai-nilai yang mereka ciptakan mendapat penilaian yang tinggi di dalam suatu kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat berupa kekuasaan, kehormatan, kekayaan, pengetahuan, dan lain sebagainya. Individu-individu yang berhasil memperoleh serta menguasai nilai-nilai yang tersebut dalam kuantiti yang banyak, pada akhirnya akan menduduki lapisan teratas dalam stratifikasi yang ada di masyarakat tersebut. Sebaliknya, mereka yang tidak memperoleh serta menguasai nilai-nilai diatas akan ditempatkan di lapisan terbawah dalam stratifikasi yang ada di masyarakat. Laswell menambahkan bahwa elit secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan disebabkan keunggulan-keunggulan yang melekat pada mereka.

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah tahapan-tahapan yang dilakukan secara sistematis dalam melakukan penelitian yang didalamnya terdapat latar belakang,

tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Di dalam latar belakang, peneliti berusaha menjelaskan alasan-alasan yang dijadikan landasan dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang Isu Antimultikulturalisme dalam wacana pembentukan Provinsi Cirebon. Penelitian ini berlandaskan pada sebuah realita bahwa negara Indonesia merupakan negara yang dimana masyarakatnya memiliki identitas kebudayaan yang amat sangat beragam di tiap-tiap daerah tidak terkecuali di Provinsi Jawa Barat yang dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang kebudayaan etnis yang bermacam-macam meskipun mayoritasnya diisi oleh masyarakat beretniskan Sunda. Lalu, muncul isu persaingan budaya yang kental kaitannya dengan nuansa anti-multikulturalisme yaitu isu Perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda oleh tokoh-tokoh Sunda. Isu ini dapat menimbulkan sebuah permasalahan karena isu ini seakan-akan mencerminkan kultur Sunda yang ingin melebarkan sayapnya memegang kuasa dan berusaha untuk menjadi kultur yang dominan, sedangkan di Jawa Barat sendiri terdapat suatu realitas multikultur yaitu di daerah Cirebon yang dihuni oleh masyarakat etnis Cirebon yang memiliki ciri khas identitas kulturnya tersendiri yang tentu berbeda dengan Sunda dan berpotensi terancam hilang apabila isu Provinsi Sunda tersebut terealisasi. Oleh karena itu, muncul sebuah respon dari kaum etnis Cirebon dengan upaya memisahkan diri dari Jawa Barat guna untuk mempertahankan identitas kebudayaannya dengan membentuk Provinsi Sendiri yaitu Provinsi Cirebon. Peneliti merasa penting untuk melihat dari sudut pandangan elit-elit Cirebon untuk memahami wacana pemisahan diri dari Provinsi Jawa Barat dengan membentuk Provinsi baru yang berawal dari isu Provinsi Sunda diatas dilihat dari kacamata Multikulturalisme.

Di dalam tinjauan pustaka, peneliti membahas konsep serta teori yang akan digunakan untuk penelitian ini diantaranya ada konsep Multikulturalisme dan konsep Elit. Multikulturalisme berasal dari bahasa Inggris *multi* (banyak) dan *cultural* (Budaya). Dengan demikian, multikulturalisme dapat dimaknai sebagai paham yang menghormati banyak kebudayaan dalam sebuah masyarakat. Multikulturalisme dapat pula diterjemahkan sebagai sebagai sebuah filosofi, program, atau kebijakan yang mengakui adanya perbedaan budaya. Dalam konteks ini, multikulturalisme sangat terkait dengan istilah-istilah lain seperti multibahasa, multiras, multietnis, multiidentitas, dan lain sebagainya. Multikulturalisme adalah gagasan atau cara pandang terhadap dunia yang mengungkapkan adanya *cultural diversity* (keberagaman budaya) yang suatu bangsa miliki, multikulturalisme adalah sebuah ide yang mengakui serta mengagungkan manusia secara universal, dan juga adanya hak akan perbedaan namun sederajat. Multikulturalisme dimulai dengan pengakuan hak untuk berbeda dan dari penghormatan terhadap keberagaman budaya, Multikulturalisme juga merupakan situasi dimana semua kelompok budaya atau ras yang berbeda dalam suatu masyarakat memiliki hak dan peluang yang sama, dan tidak ada yang diabaikan atau dianggap sebagai tidak penting. Peneliti juga memasukan konsep terkait dengan politik identitas dimana politik identitas adalah suatu penandaan kegiatan politik dalam pengertian yang lebih luas dan teorisasi terhadap ditemukannya pengalaman ketidakadilan yang dialami oleh anggota-anggota dari kelompok-kelompok sosial tertentu. Politik identitas hadir sebagai tindakan politis yang mengedepankan kepentingan kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan etnis, gender, keagamaan dan sejenisnya. Sedangkan itu, Elit adalah seseorang

atau kelompok yang mempunyai keunggulan dan menduduki puncak dalam struktur-struktur sosial masyarakat, contohnya seperti posisi-posisi tertinggi di bidang politik, pemerintahan ekonomi, agama, pengajaran, dan pekerjaan-pekerjaan bebas. Mereka yang memiliki keunggulan-keunggulan akan dikategorikan sebagai elit sedangkan mereka yang tidak memiliki keunggulan masuk ke kategori non-elit. Elit itu sendiri pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu elit pemerintah dan elit non-pemerintah. Elit memiliki kemampuan untuk mempengaruhi serta membuat suatu keputusan ataupun kebijakan di dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis fenomena sosial. Penelitian ini menekankan kepada *field research* karena penelitian dilakukan dengan cara interaksi langsung dengan narasumber ke lokasi penelitian. Metode penelitian ini digunakan guna untuk mengetahui bagaimana isu antimultikulturalisme dalam wacana pembentukan Provinsi Cirebon.

Tabel 2.2

Kerangka Pemikiran